B.5

HUMANIKA

Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum

Voleme 11 Nomor 1, Maret 2011

Penerbit:
UNIT MKU
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

ISSN: 1412-1271

ISSN 1412-1271

HUMANIKA

Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum

Volume 11, Nomor 1, Maret 2011

- **Penerbit:** Unit MKU Universitas Negeri Yogyakarta
- **Pelindung dan Penasehat:** Pembantu Rektor I Universitas Negeri Yogyakarta
- **Penanggung Jawab/Pemimpin Umum:** Ketua Unit MKU Universitas Negeri Yogyakarta
- **Penyunting Ahli:** Prof. Dr. Ajat Sudrajat, M.Ag., Dr. Muhsinatun Siyasah Masruri, M.Pd., dan Dr. Maman Suryaman, M.Pd.
- **Pemimpin Redaksi:** Dr. Marzuki, M.Ag.
- **Sekretaris Redaksi:** Dra. Rukiyati, M.Hum.
- **Anggota Redaksi:** Dra. L. Andriani P., M.Hum., Dr. Siti Irene A.D., M.Si., Drs. Suranto, M.Pd.,M.Si., Drs. Sunarso, M.Si., dan Vita Fitria, S.Ag.,M.Ag.
- **Tata Usaha/Pelaksana:** Dra. Agustin S., M.Si., dan Ari Saraswati, SIP.
- **Tata Letak:** Dra. Mami Hajaroh, M.Pd. dan Amir Syamsudin, S.Ag.,M.Ag.
- **Alamat Redaksi/Tata Usaha:** Unit MKU Universitas Negeri Yogyakarta Karangmalang Yogyakarta 55281. Telepon: (0274) 586168 Pesawat 251.

HUMANIKA ***Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*** adalah jurnal ilmiah MKU yang terbit dua kali setahun (bulan Maret dan September). ***HUMANIKA*** menerima kiriman tulisan terkait dengan Mata Kuliah Umum (MKU), yang meliputi Pendidikan Agama, Pendidikan Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan, Ilmu Sosial Budaya Dasar, Ilmu Alamiah Dasar, Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup, Perspektif Global, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan dasar-dasar ilmu pendidikan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Naskah dapat berupa hasil penelitian atau artikel ilmiah bebas dan belum pernah diterbitkan.
2. Naskah diketik dengan spasi ganda (2 spasi) dengan jumlah halaman 10-15 halaman kuarto, diketik dengan *MS Word* ukuran *font* 12 *Times New Roman*.
3. Naskah memuat komponen: judul (< 10 kata), nama penulis, abstrak (100-150 kata), isi karangan (yang memuat pendahuluan, pembahasan, dan penutup/ kesimpulan), daftar pustaka, dan biodata penulis.
4. Naskah dikirim dalam bentuk *print out* beserta *soft copy* (file).
5. Daftar pustaka ditulis secara alfabetis seperti berikut:

   Ajat Sudrajat dkk. (2008). *Din Al-Islam: Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi Umum*. Yogyakarta: Unit MKU UNY. Edisi III.

   Jalaluddin Rakhmat. (1994). *Psikologi Komunikasi.* Bandung: Remaja Rosdakarya.

PENGANTAR REDAKSI

Puji syukur terlebih dahulu kami panjatkan ke hadirat Allah Swt., Tuhan Yang Maha Kuasa, atas pertolongan-Nya penerbitan *HUMANIKA* Volume 11 Nomor 1, Maret 2011 dapat terselesaikan. edaksi mengucapkan terima kasih kepada para penulis yang dengan rela hati menyumbangkan artikel-artikelnya demi kelangsungan penerbitan jurnal ini. Redaksi selalu berharap kepada para penulis untuk selalu mendukung jurnal ini dengan tulisan-tulisan berikutnya.

Pada volume yang kesebelas ini ada beberapa perubahan terkait dengan tata letak dan cover agar tampilan *HUMANIKA* menjadi lebih baik lagi. Terbitan kali ini menyajikan tulisan-tulisan yang bervariasi dalam bingkai mata kuliah umum (MKU) atau mata kuliah pengembangan kepribadian (MPK), yaitu kajian keagamaan, kependidikan, dan sosial. Semoga tulisan-tulisan dalam jurnal ini dapat memberikan tambahan wawasan keilmuan bagi para pembaca dan menjadi modal yang berharga dalam pembinaan manusia yang berkarakter mulia.

Tentu saja jurnal ini masih jauh dari sempurna, terutama dari segi kualitas isinya. Karena itu, redaksi mohon maaf yang setulus-tulusnya atas kekurangan yang ada dan sangat mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif dari para pembaca. Semoga penerbitan *HUMANIKA* pada volume ini bermanfaat bagi para pembaca umumnya dan bagi para penulis khususnya.

Yogyakarta, Maret 2011

Redaksi

DAFTAR ISI

Pengantar Redaksi. / ii

Daftar Isi. / iii

Membangun Karakter Toleran-Militan melalui Pendidikan Inspiratif. *L. Andriani Purwastuti* / 1 – 19

Demokrasi di Indonesia (Konsep, Prospek dan Implementasinya). *Sunarso* / 20 -37.

Cara Kerja Ilmu Pengetahuan dan Sikap Kritis terhadap Informasi dalam Ajaran Islam. *Amir Syamsudin* / 38 – 48.

Nilai-nilai Kehidupan Sosial dalam Permainan Tradisional Anak di Daerah Istimewa Yogyakarta pada Era Globalisasi. *Mujinem* / 49 – 65.

Psikologi dan Kepribadian: Perspektif Al-Quran. *Suparlan* / 66 – 76.

Kajian tentang Sistem Penyelenggaraan Negara di Indonesia setelah Amandemen UUD 1945 / *Eny Kusdarini* / 77 – 87.

Pentingnya Pendidikan Karakter Anak Usian Dini untuk Mewujudkan Warga Negara yang Baik / *Sigit Dwi Kusrahmadi* / 88 – 101.

Tutorial Pendidikan Agama Islam Berbasis Pendidikan Karakter di Universitas Negeri Yogyakarta / *Syukri Fathudin Achmad Widodo* / 102 – 113

Ancaman terhadap Dasar Negara Pancasila / *Heru Santosa / 114– 122.*

Kasus Cerai Gugat pada Istri Berpendidikan Tinggi / *Sun Choirol Ummah* / 123 – 136.

Daftar Pustaka

Ardiansyah, 2007 , "Materi Workshop Tutorial PAI UNY",dalam *Makalah,* Yogyakarta, makalah tidak diterbitkan.

Darmiyati Zuhdi. 2010. *Pengembangan Model Pendidikan Karakter Terintegrasi dalam Bidang Studi di Sekolah Dasar*, Yogyakarta : Jurnal Cakrawala Pendidikan, LPM UNY.

Elkind, D.H., & Freddy Sweet, F., 2004. "How to Do Character Education" . Diambil pada tanggal 6 April 2011 dari *www.goodcharacter.com*.

Herminarto Sofyan. 2008. "Pengembangan Soft Skill Mahasiswa", *Majalah Dinamika UNY, Edisi Dies Natalis UNY,* Yogyakarta : UNY Press.

Sarbiran, 2008, "Pemikiran Praktis Membangun Kultur BCM di UNY", dalam *Makalah* Semiloka Lemlit UNY, Yogyakarta :.Makalah tidak diterbitkan.

Sumarno, 2008, "Model Pembelajaran Pendidikan Agama Islam berdasarkan Contextual and Teaching (CTL)", dalam *Makalah* Koordinasi Dosen dan Tutor Pendidikan Agama Islam, Yogyakarta : Makalah tidak diterbitkan.

Suparlan, 2009, "Otokritik Pelaksanaan Tutorial PAI di UNY Yogyakarta", dalam *Makalah* Koordinasi Dosen dan Tutor Pendidikan Agama Islam, Yogyakarta : Makalah tidak diterbitkan.

Syukri Fathudin AW , 2006 , "Menerapkan Metode Cooperative Learning dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam", *Jurnal Humanika*, Yogyakarta : UPT MKU.

Syukri Fathudin AW, Sudiyatno, 2009, "Peningkatan Perilaku Religius Mahasiswa Melalui Integrasi PembelajaranPendidikan Agama Islam (PAI) Dan Pembinaan di Unit Kegiatan Keagamaan Mahasiswa", *Jurnal Humanika,* Yogyakarta : UPT MKU UNY.

ANCAMAN TERHADAP DASAR NEGARA PANCASILA

Oleh

Heru Santosa

Abstrak

Bangsa Indonesia yang ragu-ragu dalam melaksanakan dasar negara Pancasila mengakibatkan banyak masalah yang timbul terkait kehidupan berbangsa bernegara. Terjadinya gesekan keyakinan keagamaan di dalam masyarakat menimbulkan anarki atau bertindak main hakim sendiri. Demikian juga pelanggaran HAM yang mengikis rasa kemanusiaan orang Indonesia. Persatuanpun mulai mengendur dan nasionalisme tampak memudar. Demokrasi juga hanya kelihatan sebagai demokrasi semu yang berorientasi pada ke pentingan sendiri atau kelompoknya sehingga timbul rasa keadilan yang tidak merata. Maka, bangsa Indonesia wajib kembali kepada dasar Negara Indonesia Pancasila dan secara lahir batin melaksanakannya, baik sebagai pandangan hidup bangsa maupun sumber segala sumber hukum di Indonesia.

Pendahuluan

Bangsa Indonesia sampai sekarang masih belum menemukan jati dirinya secara penuh. Hal ini disebabkan pandangan hidup bangsa yang telah disepakati dan disahkan oleh para pendiri negara *(the founding fathers)* belum diwujudkan dalam sikap dan perbuatan, baik oleh para penyelenggara negara maupun oleh rakyat biasa. Walaupun tidak dapat dinafikan ada sebagian dari warga negara Indonesia yang masih tetapi setia kepada Pancasila dan secara eksplisit menyuarakan pentingnya kembali kepada nilai-nilai Pancasila, tetapi banyak pula dari warga negara Indonesia yang sudah lupa akan nilai-nilai luhur Pancasila yang menjadi perekat kehidupan berbangsa Indonesia sejak diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945.

Ada indikasi bahwa terdapat pihak-pihak yang ingin menyingkirkan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, terbukti dengan adanya gerakan-gerakan yang radikal seperti NII dan kelompok fundamental agama yang tidak toleran. Ada pula yang seakan meremehkan bahwa yang namanya Pancasila itu sudah ketinggalan zaman. Ada pula kelompok yang berpandangan bahwa sampai saat ini Indonesia tidak lepas dari masalah penderitaan, kemiskinan dan ketidakadilan karena berdasar pada Pancasila. Mereka sampai pada kesimpulan bahwa Indonesia salah dalam memilih ideologi sehingga tidak membawa kesejahteraan rakyat, tetapi malah sebaliknya. Mereka lupa bahwa pembangunan Indonesia sebagai upaya menciptakan kesejahteraan seharusnya sesuai dengan amanat Pancasila, Konstitusi dan Proklamasi 17 Agustus 1945, tetapi yang terjadi justru pembangunan

didasarkan pada ideologi lain yang bersifat samar-samar dan membahayakan keutuhan bangsa (Rikard Bagun,Kompas Senin 16 Agustus 2010).

Sampai sekarang belum terlihat jelas upaya penyelenggara negara mewujudkan sila – sila Pancasila secara sungguh-sungguh. Para penyelenggara negara tidak pernah sepenuh hati melaksanakan sila-sila Pancasila secara kongkret. Era reformasi sekarang ini banyak pihak yang skeptis terhadap Pancasila. Jangankan dilaksanakan dengan kesungguhan, keinginan membicarakan Pancasila pun cenderung setengah hati belakangan ini. Terkesan sudah mati angin sehingga Pancasila seperti ditelantarkan. Tidak banyak yang peduli jika Pancasila diganggu oleh ideologi lain. Tidak ada kegairahan tinggi yang mampu mengartikan Pancasila terus-menerus agar Pancasila semakin berakar kuat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tanpa banyak disadari penghayatan dan pengamalan Pancasila menjadi kedodoran. Semakin terasa kegamangan dan kehampaan m endalam dalam diri warga bangsa dalam berPancasila. Seolah Pancasila tidak mendatangkan kebanggaan lagi. Tampak sekali perbedaannya dengan ketika pertama kali Pancasila dikemukakan oleh Soekarno dan dibahas lebih lanjut di dalam sidang-sidang BPUPKI pada masa menjelang kemerdekaan.

Sebenarnya, masih relevan dan aktualkah membicarakan Pancasila dalam situasi seperti ini? Dominasi praktik kehidupan yang seperti apa yang mengancam implementasi nilai-nilai Pancasila? Kiranya, bangsa Indonesia perlu merefleksikan diri dengan berbagai fenomena yang terjadi sekarang ini sehingga menimbulkan kesadaran baru akan pentingnya kita kembali kepada nilai-nilai Pancasila dengan berbagai fungsi dan kedudukannya yang mendasar di tengah kerasnya persaingan ideologi seperti sekarang ini.

Pancasila Berfungsi Integratif

Disadari atau tidak, Pancasila mempunyai fungsi integratif yang menjamin kesatuan Negara bangsa Indonesia yang pluralistik. Terlalu berat taruhannya, jika Pancasila dilecehkan, lebih – lebih karena posisinya sebagai dasar eksistensi Negara RI yang diproklamasikan 17 Agustus 1945. Tidaklah berlebihan, jika Pancasila menjadi salah satu kekaguman dunia luar terhadap Indonesia karena mempunyai fungsi mempersatukan masyarakat dan wilayah nusantara yang begitu luas, dengan berbagai latar belakang suku, budaya, bahasa, dan agama. Perlu diketahui bahwa Pancasila merupakan warisan luar biasa para pendiri bangsa yang mengacu pada nilai – nilai luhur, yang bersifat orisinal dan tahan zaman. Sungguh warisan nilai yang sangat luar biasa. Sayangnya, warisan luar biasa tersebut

cenderung kurang dihargai sehingga tidak sepenuhnya dijalankan sebagai suatu penciptaan sejarah Indonesia dalam kontinum waktu yang berjalan.

Tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia yang mengaku berPancasila adalah masih banyak terdapat kerancuan tentang pemahaman, penghayatan dan perasaan ke Indonesiaan di antara sesama warga bangsa. Tidak sedikit anggota masyarakat belum menempatkan dirinya sebagai warga negara yang harus tunduk kepada ideologi Pancasila dan Konstitusi UUD' 45. Masih banyak pula yang mencampur-adukan pengertian sebagai warga negara dengan posisi sebagai anggota kelompok etnik, budaya, bahasa, dan agama. Sebagai dampaknya, bukannya tunduk kepada Pancasila dan konstitusi negara tetapi justru menggugatnya. (Notonagoro 1971: 8).

Eksistensi negara dan bangsa Indonesia yang pluralistik terancam bubar jika dasar negara Pancasila dan konstitusi UUD 45 tidak dijadikan ukuran dan acuan dalam berpikir serta berperilaku sebagai warga Negara. Sudah menjadi tugas semua anggota masyarakat terutama pemerintah untuk menberikan kawalan terhadap dasar Negara Pancasila dan konstitusi UUD 45. Pemerintah bahkan memiliki wewenang istimewa untuk menindak warga yang tidak tunduk pada dasar Negara dan konstitusi. (Andi Suruji, Kompas, Sabtu 14 Agustus 2010). Berbagai fenomena yang ada menyurutkan langkah maju aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan, di antaranya tampak dalam berbagai peristiwa berikut:

No DP

Fenomena Degradasi Sosial-Keagamaan

Menyaksikan proses kehidupan bernegara dan berbangsa Indonesia akhir- akhir ini, potensi kemungkinan Indonesia menjadi " negara gagal" semakin besar. Mengacu pada pernyataan Francis Fukuyama, ancaman terbesar abad ke 21 adalah " negara gagal", ditandai antara lain kemiskinan, pengangguran, konflik antar kelompok, dan merebaknya aksi teror. Untuk kasus aktual Indonesia, pernyataan Fukuyama lima tahun lewat itu terlihat dalam kasus – kasus pembiaran rakyat menyaksikan sendiri masalah – masalah yang membelitnya, seperti kenaikan tarif listrik, kemiskinan, gas meledak, perilaku korupsi dan terinduksinya keluhuran politik jadi sekedar politik praktis berdurasi pendek, kerdil dan bernuansa sempit. Kekerasan yang merebak dalam berbagai bentuk terjadi semakin sporadis dan massif dari yang fisik hingga simbolik, mengidikasikan berkembang suburnya sisi kekerdilan manusia. Cara berpikir dan bertindak atas nama ideologi agama, tetapi sebenarnya membenarkan doktrin sempit agama, menegaskan pendapat Fukuyama semakin mengancam. Meskipun kita boleh menghibur diri, potensi " negara gagal" perlu dihadapi, tidak dengan menafikan, tetapi

meletakkannya sebagai kemungkinan yang menantang untuk dikritisi dan berusaha mencegahnya. Sebabnya, tidak hanya krisis identitas, tetapi juga krisis intelektual dan hati nurani (akhlak) yang mencerminkan krisis karakter bangsa. (Soemarno Soemarsono, 2009) Karena pembangunan karakter diabaikan, kondisi bangsa Indonesia sekarang ibarat gunung es yang kelihatan gagah perkasa tetapi jiwa dan fondasinya rapuh.

Kondisi Indonesia saat ini, menurut Soemarno (2009) serupa dengan yang dikhawatirkan oleh Mahatma Gandhi tentang tujuh dosa yang mematikan, meliputi berkembangnya nilai dan perilaku budaya kekayaan tanpa bekerja, kesenangan tanpa nurani, pengetahuan tanpa karakter, bisnis tanpa moralitas, ilmu pengetahuan tanpa kemanusiaan, agama tanpa pengorbanan. Berbagai fenomena degradasi kehidupan sosial keagamaan dapat dilihat dari berbagai peristiwa dan kebiasaan berikut:

1. Meningkatnya kekerasan

Kekerasan terus-menerus terpapar, menjadikannya seperti tontonan pornografi yang dinikmati diam-diam. Selain kekerasan politik yang melenyapkan hidup jutaan warga dan meninggalkan trauma sejarah sejak tahun 1965, kekerasan terus terjadi, susul menyusul , vertikal maupun horizontal menyangkut soal publik maupun privat, termasuk pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan. Kekerasan yang merampas hak – hak sipil dan politik berkelanjutan dengan perampasan hak – hak ekonomi, sosial dan budaya. Situasi ini tidak dapat disederhanakan hanya sebutan "warisan Orde Baru" yang militeristik dan melindungi impunitas para pelakunya. Sampai 11 tahun setelah Reformasi 1998, negara gagal membangun sistem dan legitimasi untuk menolak kekerasan. Sebaliknya, kekerasan justru digunakan atas nama " mendisiplinkan dan melindungi nilai – nilai moral dan ajaran " dari satu perspektif dengan dalih "atas nama demokrasi" sehingga menghasilkan kebijakan- kebijakan yang diskriminatif dan menciptakan tekanan hidup yang melahirkan beragam tindakan kekerasan terhadap orang lain, anggota keluarga, maupun diri sendiri. Orang menjadi cepat lupa, bahkan menganggap kekerasan seperti hal biasa, *the banality of evil*, meminjam istilah filosof Hannah Arendt.

Warga tidak dididik belajar menghormati hidup, sebaliknya terus – menerus dipaksa belajar berlutut di hadapan kekerasan untuk kemudian ikut memproduksi dan mereproduksi kekerasan. Sejarah negeri ini mengenal kekerasan dalam spektrum luas, mulai dari amuk masa dan kekalapan tak terkendali sampai – sampai kekerasan pasif, seperti pepe, tindakan protes dengan menyakiti diri sendiri. Warga tak pernah dididik secara sistematis untuk belajar bernegosasi dengan kedudukan setara sehingga membuat

wajah kekerasan tampak makin rakus dan keji. Juga tak terlihat pembelajaran tentang dampak kekerasan, seberapa kejam dan luas skalanya.

2. Parodi pameran kekayaan

Disisi lain, banyak orang tidak risi memamerkan kekayaan, ditonton jutaan orang yang mengais sisa rejeki untuk bertahan hidup. Iklan – iklan yang menawarkan gaya hidup mewah bertebaran ditonton orang – orang dengan perut lapar dan mata kosong.Tuntutan masyarakat yang kehilangan hak hidup akibat kesusahan sosial, ekologis dan perampasan sumber daya menjadi seperti parodi. Para pelaku, penguasa sumber daya (ekonomi dan politik), tak sulit menuntut balik untuk membalikkan posisi korban sebagai pelaku kekerasan. Kemanusiaan menampakan wajahnya saat terjadi bencana, namun tak sulit juga menengarai solidaritas itu semua bersifat karitatif dan sangat sementara. Bahkan tak sedikit yang memanfaatkan untuk kepentingan politik, melalui umbul – umbul bernuansa keagamaan dan bendera berlambang partai.

3. Persatuan yang semakin memudar

Ada titik – titik dalam perjalanan bangsa yang sulit untuk dicapai, bahkan tidak sedikit pula titik di mana kita merasa kehilangan persatuan. Perjuangan bapak bangsa Bung Karno sebagai pemimpin yang mendominasi panggung politik Nasional dan tokoh yang fasih mengartikulasikan ide, panggung hidup di hati Bung Karno kemudian bergaung luas di tengah – tengah rakyat Indonesia. Memang ada serangkaian upaya untuk memecah Indonesia, tetapi NKRI tetap utuh bahkan setelah Bung Karno pergi.

Pak Harto punya visi dan cara mempersatukan bangsa yang lain lagi. Didukung oleh teknologi. Sekilas mendiang Iskandar Alisyabana , Indonesia disatukan oleh satelit palapa. Saat Palapa A1 diluncurkan tahun 1976, Indonesia menjadi negara keempat dunia yang memanfaatkan satelit komunikasi domestik. Dengan teknologi satelit itulah sambungan langsung jarak jauh (SLJJ) dimungkinkan, siaran televisi dari Jakarta.

Pertanyaannya " bersatu dalam keragaman apakah historis atau utopia " dapat kita jawab dalam dua aspek. Bung Karno dan pemimpin berikutnya telah menjawab bagiannya masing – masing. Jadi historisnya ada, namun selanjutnya ia bisa jadi utopia manakala para pemimpin dan kita semua lalai memgerjakan tanggung jawab masing – masing. (Ninok Laksono, Kompas, 12 Agustus 2010 hal 1).

Pudarnya persatuan terlihat dalam berbagai bentuk kekerasan yang sering terjadi karena hal sepele. Lihat saja fenomena tawuran antar-kampung atau bahkan antar-mahasiswa. Demikian pula fenomena NII dan kelompok terorisme. Semua hal di atas perlu dicari solusi segera oleh segenap komponen bangsa, terutama oleh para penyelenggara negara yang memegang mandat kekuasaan dari rakyat.

4. Demokrasi masih coba-coba

Demokrasi di Indonesia diawali dengan demokrasi parlementer atau demokrasi liberal (1950 – 1959), demokrasi terpimpin (1959 – 1966) dibawah Soekarno, menuju demokrasi Pancasila (1967 – 1998) dibawah kontrol Soeharto. Ketiga model demokrasi itu tidak berakhir dengan baik. Pasca Orde Baru demokrasi sedang mencari bentuknya, entah menuju demokrasi liberal atau model lain. Demokrasi di Indonesia lebih ideal bilamana tidak seperti sekarang ini. Untuk demokrasinya jelas bukan Demokrasi Liberal dan bukan demokrasi terpimpin. Hal ini untuk menghindari politikus kutuloncat dari partai satu ke partai yang lain. Bangsa Indonesia mantap mempunyai 5 partai dan Amerika mempunyai dua partai. Dan bangsa Indonesia berdemokrasi di bawah Dasar Negara Pancasila. Pemilihan Presiden langsung adalah revolusi, bukan hanya presiden yang dipilih lansung saja, tetapi Gubernur, Walikota, Bupati juga dipilih langsung. Ini pertama kalinya dalam sejarah Republik Indonesia rakyat memilih sendiri pemimpinnya.

Demokrasi banyak disuarakan di era reformasi. Namun mencari definisi demokrasi dalam konstitusi tidak mudah. Dalam UUD' 45 hanya terdapat dua kata demokrasi , satu dalam bentuk kata sifat yakni, "Demokratis" dan "Demokrasi". Pertama dalam pasal 18 yang menyebutkan pemilihan kepala daerah dipilih secara demokratis dan pada pasal 33 soal Demokrasi Ekonomi. Eksperimen demokrasi mewujud dengan pemungutan suara, voting menjadi kata kunci. Mayoritas lawan minoritas, menang atau kalah.

Kita sedang dihadapkan pada keprihatinan di mana demokrasi yang mewujud dalam Pilkada menghadirkan pimpinan yang terjerat kasus korupsi atau pimpinan yang menjadi aktor penghambat kebebasan beragama.

Snyder dalam *From Voting Convidence* (2000) menyampaikan pesan " membangun demokrasi bukan hanya menyingkirkan penguasa otoriter, dan selanjutnya demokrasi akan langsung". Snyder berpesan agar kita hati – hati menyelenggarakan demokrasi karena berpotensi memunculkan guncangan. Transisi demokrasi di Indonesia membuat demokrasi menjadi suatu yang eksplosif. Karena eksplosif sering tanpa kontrol, ditambah faktor lainnya sering berujung pada anarki.

Pusat informasi Kompas mencatat, dalam kurun waktu Mei 2005 – Juli 2010 paling tidak terjadi 49 kali konflik horisontal akibat pemilihan kepala daerah. Protes massa berubah menjadi anarki yang mengerikan. Gejala eksplosi demokrasi mulai memunculkan kesadaran baru. Ketua Makamah Konstitusi Mahfud MD menyatakan,pemilihan kepala daerah langsung perlu ditinjau ulang. Alasannya, Pilkada langsung merusak moral masyarakat. Kerusuhan itu massif, karena melibatkan seluruh rakyat. (Tempo 3 Agustus 2010).

Apa yang sebenarnya terjadi dalam eksperimen demokrasi Indoinesia? Azyumardi Azra menyebutkan euforia demokrasi tidak berjalan sejajar dengan peningkatan pemahaman soal demokrasi itu sendiri. Kebebasan kerap disalahartikan sebagai kebebasan tanpa aturan *(lawlessness freedom)* dan tanpa kepatuhan pada hukum. Gejala kekerasan yang terjadi menunjukkan masih jauhnya pemahaman demokrasi sebagai *art of compromise*. Musyawarah mufakat menjadi kata kunci, tetapi proses politik menengahkan pudarnya musyawarah untuk mufakat. Tren baru mengarah pada demokrasi tradisional. Partai politik menjadi penyewa perahu bagi kandidat untuk maju dalam pilkada dan itu uang. Kandidat Gubernur harus membayar konsultan politik untuk memacu citra dan itu berarti uang. Kandidatpun harus memberikan uang kepada pemilih.

5. Kewargaan publik

Demokrasi tidak cukup bisa dikembangkan sendiri, ia harus disesuaikan, dipupuk secara terencana. Ia membutuhkan pendidikan kewargaan yang mencakup *democratic education, civic education* dan *citizenship education.* Kurangnya pendidikan kewargaan yang baik di kalangan masyarakat Indonesia menyebabkan adanya pemahaman yang keliru di masyarakat bahwa kebebasan disamakan artinya dengan seenaknya berbuat anarkis dan semaunya memaksakan kehendak sehingga menafikan adanya kebebasan yang bertanggung jawab. Kesadaran kewargaan publik belum terbangun karena kurangnya pendidikan kewargaan sehingga belum muncul rasa saling memiliki, rasa saling memperbaiki dan rasa saling memelihara untuk kepentingan bersama. Fenomena yang muncul adalah individualisme yang mengarah pada pemenuhan kepentingan sendiri dengan menghalalkan segala cara.

Aktualisasi Pancasila

Menempatkan kembali Pancasila sebagai referensi kekayaan peradaban, warisan bapak bangsa dan menempatkannya sebagai antisipasi kecenderungan negara gagal ibarat berseru di padang pasir, tetapi tetap harus diserukan. Hal itu perlu dilakukan sebagai upaya menemukan kekayaan budaya Indonesia, bagian dari obsesi mengenali kembali kepribadian bangsa dan merajut nusantara menjadi actual. Perkembangan dunia yang serba cepat menuntut bangsa Indonesia memiliki landasan kokoh yang benar-benar dijadikan pijakan hidup: Pancasila.

Kelima sila dengan inti dasarnya kemanusiaan (Drijarkara, 2006), mengerucut pada sila pertama Ketuhanan yang Maha Esa, merupakan ideologi yang lengkap dan tepat untuk Indonesia yang bhineka. Karena itu anjuran aktualisasi dan revitalitas merupakan keharusan yang ditempatkan tidak hanya dalam mewujudkan sila – sila Pancasila terutama dalam konteks ini sila pertama, tetapi lebih jauh lagi dalam kaitan hubungan antar agama dan negara. Munculnya perda – perda syariah bermasalah menyangkut proses keberagaman , merebaknya kelompok-kelompok radikal berdasarkan agama, menunjukkan belum selesainya tuntasnya hubungan agama dan negara, yang menyangkut dua hal pokok: Pertama, hubungan negara dan agama, dan kedua implementasi prinsip negara berketuhanan dalam peraturan perundang-undanga

Dalam pemahaman beragaman-pluralisme multi kulturalisme sebagai toleransi dan kerukunan hidup beragama terbentang tarik ulur. Artinya, ada proses dialog terus-menerus untuk terbangunnya empati dan rasa saling percaya antar-sesama warga bangsa. Generasi mendatang memerlukan keteladanan dari generasi sekarang dalam berbagai hal terutama dalam hal aktualisasi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa yang benar-benar direalisasikan dalam perbuatan.

Simpulan

Dari paparan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa bangsa Indonesia mulai sekarang harus kembali ke Dasar Negara Pancasila, tidak hanya secara lahir saja tapi harus di maknai sampai mendalam. Pancasila harus dipelajari dan diamalkan dari lapisan paling atas sampai pada lapisan terbawah. Pancasila yang sudah dipikirkan dan ditanamkan oleh bapak —bapak pendiri bangsa jangan sampai hanya menjadi dokumen historis semata.

Pengembangan intelektualitas dan kehidupan yang cerdas, kreatif mendesak untuk dilakukan sebagai upaya mengejawantahkan nilai-nilai luhur Pancasila yang berpusat pada manusia adil dan beradab. Implementasi nilai-nilai Pancasila sangat mungkin dilakukan karena nilai-nilai Pancasila tersebut bukanlah suatu utopia, melainkan merupakan nilai-nilai

yang pernah dan telah lama hidup dalam masyarakat Indonesia sebagaimana dinyatakan oleh Bung Karno. Optimisme terhadap Pancasila perlu dibangkitkan agar segala ancaman terhadapnya dapat dihilangkan. Bila hal-hal tersebut dapat dilakukan, maka bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang mandiri dan negara Indonesia tidak menjadi "negara gagal".

– paparan gagasan; kurang jelas kaitan antara pertanyaan, pembahasan, dan tujuan, meski ada.
– pri nas ho·alis, lian lambat...
– 113 – 121.

60% x 6 = 3,6

DAFTAR PUSTAKA

Drijarkara, 2006, K*arya lengkap Drijarkara*, Yogyakarta: Kanisius.

Kaelan, 1983, *Proses Perumusan Pancasila dan UUD 1945*, Liberty, Yogyakarta.

Kaelan, 1996, *Filsafat Pancasila*, Yogyakarta, Paradigma.

Kaelan, 2001, *Pendidikan Pancasila,* Edisi Reformasi, Yogyakarta, Paradigma

Koento Wibisono,1998, "Pancasila dalam tinjauan Filsafat". *Makalah* pada Internship Dosen Pancasila dan Filsafat se-Indonesia, pada tanggal 19 – 28 Juli 1998, Yogyakarta, Dirjen Dikti.

Mahfud, MD,1998, "Pancasila Sebagai Paradigma Pembaharuan Tatanan Hukum". *Makalah* pada Internship Dosen Filsafat dan Pancasila se- Indonesia, tanggal 19 – 28 Juli 1998, Yogyakarta, Dirjen Dikti.

Ninok Laksono, 2010, Kompas edisi 12 Agustus 2010.

Noto Nagoro, 1971, *Pancasila secara Ilmiah Populer*, Jakarta, Bina aksara.

Bikard Bagun, 2010, *Kompas* edisi 16 Agustus 2010.

Sularto, 2010, Kompas edisi 10 Agustus 2010.

Soemarno Soemarsono, 2009, *Karakter Mengantar Bangsa dari Gelap Menuju Terang*, Jakarta: Elex komputindo.

KASUS CERAI GUGAT PADA ISTRI BERPENDIDIKAN TINGGI

Oleh:
Sun Choirol Ummah

Abstrak

Tingkat pendidikan yang rendah dan komitmen keluarga yang rapuh, seringkali memicu berbagai konflik dalam rumah tangga, utamanya terhadap perempuan. Banyaknya perempuan berpendidikan tinggi dewasa ini, tidak hanya membanggakan perempuan sendiri sebagai pelaku pendidikan, namun merambah pada lingkungan keluarga, lembaga pendidikan, para pemerhati kesetaraan gender hingga pemegang kebijakan pendidikan di tingkat daerah maupun nasional. Berbekal pendidikan tinggi, perempuan lebih memiliki akses yang luas di ranah publik. Banyak sekali perempuan telah mampu bersaing di hampir seluruh lini pekerjaan, sehingga kebijakan pemerintah pun kini mulai bergeser, tidak hanya mengacu pada kebijakan maskulinitas, walaupun berbagai bias masih saja ditemukan. Tingkat pendidikan yang tinggi, karir yang mapan, dan kesejahteraan yang terjamin merupakan tapakan sinergis dalam menata sebuah kehidupan rumah tangga. Namun, di pihak lain pendidikan tinggi yang dimiliki istri, justru menjadi bumerang terhadap meningkatnya kasus cerai gugat. Hal ini ditengarai akibat pengaruh budaya modern, kemandirian ekonomi istri, kejelian istri menangkap permasalahan keluarga, dan keberaniannya menyuarakan hak-haknya.

Kata kunci: pendidikan tinggi, kesetaraan gender, cerai gugat.

Pendahuluan

Pendidikan sejatinya merupakan bagian dari kehidupan manusia dan bersifat universal. Pendidikan berlangsung sejak lahir hingga akhir hayat dan dilaksanakan di lingkungan keluarga maupun di masyarakat dengan bantuan orang lain maupun secara mandiri. Pada masyarakat yang paling sederhana pun berlangsung proses pendidikan. Kemajuan di bidang pendidikan terkait dengan perkembangan kehidupan manusia. Dalam masyarakat yang telah maju, taraf pendidikan anggotanya lebih tinggi dibanding masyarakat tradisional (Sri Emi Yuli Suprihatin, 2008: 81).

Secara kodrati manusia memiliki hak untuk mengatur, membangun, dan mengarahkan destininya sendiri. Potensi itu pada dasarnya adalah untuk ditumbuhkembangkan melalui *cultural struggle* manusia secara terus menerus, baik secara individual maupun sosial. *Cultural struggle* itu tidak lain adalah pendidikan (Freire, 1984: 4). Di kalangan masyarakat modern, dorongan mengatur kehidupan untuk masa depannya jelas nampak pada kesadarannya memeroleh keterampilan atau jejang pendidikan yang lebih tinggi.

Jenjang pendidikan tinggi seperti dalam Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003, merupakan jenjang setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.